

Peran Pemerintah Kabupaten Badung dalam Mengatasi *Overtourism* di Desa Pecatu

Ni Kadek Rita Anggreni¹, Putu Eva Ditayani Antari²

^{1,2}Universitas Pendidikan Nasional Denpasar

Email ritacahya14@gmail.com

ABSTRAK: Lonjakan wisatawan di Bali, khususnya di Desa Pecatu, mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga menimbulkan masalah *overtourism* yang berdampak pada lingkungan, budaya, dan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengatasi *overtourism* di Desa Pecatu serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Penelitian empiris ini menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani *overtourism* di Desa Pecatu melalui pendekatan yuridis kualitatif, menggunakan data primer dan sekunder yang diverifikasi dengan triangulasi untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif. *Overtourism* di Desa Pecatu meningkatkan pendapatan dan peluang usaha bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan kemacetan, penurunan kenyamanan, masalah kebersihan, serta penyusutan nilai budaya lokal akibat komersialisasi berlebihan. Pemerintah daerah mengatasi *overtourism* di Desa Pecatu dengan membangun infrastruktur, membatasi jumlah wisatawan, mengelola sampah, memperketat regulasi, serta mendorong partisipasi masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi, lingkungan, dan budaya. Dampak negatif *overtourism* di Desa Pecatu lebih dominan, mencakup kemacetan, penurunan kenyamanan, degradasi lingkungan, dan hilangnya nilai budaya, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat merugikan sektor pariwisata dan ekonomi lokal.

KATA KUNCI: *overtourism*, pariwisata, pemerintah, wisatawan.

I. PENDAHULUAN

Bali, dikenal sebagai Pulau Dewata, adalah destinasi wisata internasional yang menawarkan keindahan alam dari pantai Kuta hingga sawah Ubud serta gunung megah seperti Agung dan Batur. Kaya akan budaya Hindu, tradisi, dan seni, Bali memikat wisatawan dengan upacara keagamaan seperti Galungan dan Nyepi, serta tarian khas seperti Tari Kecak dan Barong (Samudra dkk., 2023). Pura ikonik seperti Tanah Lot dan Uluwatu menambah daya tarik spiritual dan arsitekturalnya. Kunjungan wisatawan terus meningkat, baik mancanegara yang tertarik pada pantai eksotis dan seni lokal maupun domestik yang menikmati wisata spiritual dan petualangan alam. Dengan berbagai aktivitas seperti berselancar, menyelam, trekking, hingga relaksasi, serta keramahan masyarakat yang menjunjung nilai Tri Hita Karana, Bali menjadi destinasi ideal yang berkesan bagi semua pengunjung.¹

Lonjakan wisatawan asing ke Bali mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi lokal melalui peningkatan lapangan kerja di perhotelan serta UMKM yang menjual kerajinan dan kuliner khas, disertai pembangunan infrastruktur seperti hotel dan resort (Pratama dkk., 2022). Namun, tantangan seperti *overtourism*, kemacetan, polusi, dan degradasi lingkungan muncul, mengancam keaslian budaya di tengah globalisasi. *Overtourism* menyebabkan kerusakan ekosistem, polusi, serta menurunkan kualitas hidup penduduk lokal, dengan dampak nyata di daerah padat wisatawan seperti Kuta, Seminyak, dan Ubud.²

Kabupaten Badung di selatan Bali adalah pusat pariwisata utama yang mencakup Kuta, Seminyak, Canggu, Jimbaran, dan Nusa Dua, menawarkan pantai indah, kehidupan malam semarak, serta akomodasi beragam dari vila mewah hingga hotel terjangkau. Desa Pecatu, dengan daya tarik seperti Pura Luhur Uluwatu dan pantai eksotis, menarik wisatawan global, terutama peselancar dan pencinta matahari terbenam.

¹ Victor Bangun Mulia, 'MEMAHAMI DAN MENGELOLA DAMPAK PARIWISATA' (2021) 20(1) 75.

² RB Wahyuni, 'Kajian Faktor Overtourism Di Destinati Wisata Bahari Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat' (2022) 9(1) *Barista: Jurnal Kajian Bahasa Dan Pariwisata*.

Lonjakan wisatawan mendukung ekonomi lokal melalui sektor akomodasi, restoran, dan penyewaan selancar, tetapi juga memicu masalah *overtourism*, termasuk konflik antara pecalang dan wisatawan asing, seperti insiden viral di Jalan Labuan Sait saat upacara Melasti, yang menyoroti tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pariwisata dan tradisi adat Bali.³

Overtourism di Bali juga memicu berbagai permasalahan, termasuk insiden yang melibatkan Darja Tuschinski, seorang wanita Jerman yang berkendara telanjang dada akibat depresi berat, sehingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa (Amalika dkk., 2024). Selain itu, kecelakaan lalu lintas tragis terjadi di Pecatu ketika seorang turis asal Cina, Li Peng, berkendara melawan arus dan menabrak pengendara lokal, Subaidi, yang mengakibatkan kematian Subaidi di tempat kejadian. Insiden ini mencerminkan dampak negatif dari wisatawan yang tidak mematuhi aturan dan menunjukkan tantangan dalam menjaga ketertiban di tengah lonjakan turis di Bali.⁴

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa lonjakan wisatawan di Bali menyebabkan kemacetan, kerusakan lingkungan, dan penurunan kualitas hidup penduduk, yang diperburuk oleh kebijakan pengelolaan destinasi yang kurang efektif. Wijaya (2023) menyoroti perlunya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengatasi *overtourism* melalui sistem zonasi, peningkatan fasilitas umum, dan edukasi wisatawan. Temuan ini menekankan pentingnya tindakan strategis dari Pemerintah Kabupaten Badung untuk menyeimbangkan pengembangan pariwisata dengan pelestarian lingkungan dan budaya di Desa Pecatu.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengatasi masalah *overtourism* di Desa Pecatu dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan setempat.

³ ANK Nisa, 'The Role Of Bumdes In Overcoming Over Tourism In Bejiharjo Tourism Village Karangmojo District Gunung Kidul Regency' (2023) 1(2) *Journal Of Tourism Sciences (Toursci)*.

⁴ W Mudiparwanto and A Gunawan, 'Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (Oss)' (2021) 7(1) *Diversi: Jurnal Hukum* 106.

II. METODE

Penelitian empiris ini mengkaji efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menangani *overtourism* di Desa Pecatu serta dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan melalui pendekatan konseptual, undang-undang, dan fakta.⁵ Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi, sementara data sekunder berasal dari peraturan, jurnal, dan literatur terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara dengan pejabat, masyarakat, serta pemangku kepentingan untuk memperoleh perspektif mendalam.⁶ Keabsahan data dijamin melalui triangulasi, wawancara mendalam, analisis konten, serta verifikasi keandalan dan validitas. Analisis yuridis kualitatif digunakan untuk memahami fenomena *overtourism* secara deskriptif guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.⁷

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak *Overtourism* yang Terjadi di Desa Pecatu

1. Peningkatan Pendapatan

Fenomena *overtourism* di Desa Pecatu memberikan dampak ekonomi positif yang signifikan, terutama dalam peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor pariwisata oleh pemerintah daerah sesuai dengan teori kewenangan.⁸ Pemerintah Kabupaten Badung, melalui Dinas Pariwisata, memiliki kewenangan dalam mengelola potensi wisata sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan meningkatkan jumlah wisatawan yang datang.⁹ Meskipun *overtourism*

⁵ N Angkasa, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar* (CV. Laduny Alifatma, 2019).

⁶ PED Antari and VAY Situmorang, 'Efektivitas Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETle) Dalam Penegakan Aturan Lalu Lintas Di Kota Denpasar' (2024) 10(2) *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 310.

⁷ Muhammad Sidiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).

⁸ I Abdul Kadir, LW Wulandari and T Hendratono, 'Pengembangan Batu Angus Sebagai Kawasan Geowisata Melalui Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Ternate Maluku Utara' (2022) 1(2) *Scientia: Journal Of Multi Disciplinary Science* 86.

⁹ BGA Rama et al, 'Pemberdayaan Subak Uma Lambing: Implementasi Green Tourism Dan Kesadaran Hukum' (2024) 5(6) *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 12966.

menimbulkan berbagai tantangan, peningkatan jumlah wisatawan berdampak langsung pada sektor ekonomi, seperti akomodasi, restoran, transportasi, dan oleh-oleh, yang memberikan keuntungan bagi pelaku usaha lokal, termasuk pemilik hotel dan warung makan.¹⁰ Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pariwisata yang dikelola dengan baik berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah dan membuka peluang kerja bagi masyarakat, baik dalam sektor pariwisata langsung maupun sektor pendukung lainnya .¹¹

2. Kemacetan dan Penurunan Kenyamanan

Fenomena *overtourism* di Desa Pecatu menimbulkan dampak sosial negatif seperti kemacetan dan penurunan kenyamanan, yang dapat dianalisis melalui teori kewenangan yang menekankan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola infrastruktur dan transportasi.¹² Ketidakmampuan dalam mengatur arus wisatawan secara efektif dapat mengganggu kualitas hidup masyarakat lokal, di mana kemacetan memperburuk mobilitas dan kenyamanan dalam aktivitas sehari-hari, sehingga diperlukan perencanaan transportasi yang baik agar dampak negatif ini dapat diminimalkan.¹³ Penelitian menunjukkan bahwa kemacetan di destinasi wisata menjadi indikator kegagalan dalam mengelola pariwisata secara berkelanjutan, yang tidak hanya mengurangi kenyamanan wisatawan tetapi juga menurunkan daya tarik destinasi tersebut, berpotensi berdampak negatif pada industri pariwisata jangka panjang.¹⁴ Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Badung perlu menerapkan kebijakan yang mempertimbangkan kapasitas daya dukung destinasi serta mengembangkan infrastruktur yang mampu mengatasi dampak sosial negatif dari *overtourism* agar keberlanjutan pariwisata tetap terjaga.

¹⁰ H Hariyanto, 'Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia' (2020) 3(2) *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 99.

¹¹ A Hartami, L Karjoko and F Ulfatun Najicha, 'Optimalisasi Peran Pemerintah Dalam Kebijakan Penanganan Limbah Medis' (2023) 2(1) *Pledoi (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 12.

¹² R Munawar, 'Pengelolaan Geopark Untuk Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan (Studi Kasus Di Geopark Ciletuh-Palabuhanratu)' (2023) 21(1) *Jurnal Bisnis, Manajemen & Ekonomi* 865.

¹³ F Hadi and F Gandryani, 'Konstitutionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah: The Constitutionality Of Nusantara Capital City Authority As A Local Government' (2022) 52(1) *Majalah Hukum Nasional* 69.

¹⁴ Antari and Situmorang (n 6).

3. Peningkatan Pendapatan

Fenomena *overtourism* di Desa Pecatu membawa dampak negatif pada lingkungan, terutama masalah kebersihan akibat peningkatan volume sampah dari aktivitas wisatawan yang melebihi kapasitas daya dukung destinasi.¹⁵ Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan yang tepat dalam mengatur perilaku wisatawan melalui edukasi dan tindakan tegas dari pemerintah daerah agar konsep pariwisata berkelanjutan dapat terwujud dengan pengelolaan sampah yang efektif serta kebijakan pengurangan limbah di destinasi wisata.¹⁶ Penelitian menunjukkan bahwa kebersihan menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan destinasi wisata, terutama jika infrastruktur pengelolaan sampah tidak mampu mengimbangi lonjakan jumlah wisatawan, sehingga pemerintah daerah harus responsif dalam menerapkan kebijakan yang mengatur perilaku wisatawan serta meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah.¹⁷ Tanpa regulasi yang tepat, masalah kebersihan dapat berkembang menjadi isu lingkungan yang lebih besar dan mengurangi daya tarik wisata, sehingga diperlukan kebijakan yang melibatkan teknologi, regulasi yang ketat, serta partisipasi masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pariwisata.¹⁸

4. Penyusutan Nilai Adat dan Budaya Lokal

Fenomena *overtourism* di Desa Pecatu berdampak signifikan terhadap budaya lokal, terutama dalam bentuk erosi nilai adat akibat interaksi wisatawan yang kurang menghormati tradisi masyarakat setempat.¹⁹ Kehadiran wisatawan dalam jumlah besar dapat mengubah cara hidup masyarakat, menjadikan budaya lokal sekadar tontonan

¹⁵ F Andrianto, 'Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia' (2020) 3(1) *Administrative Law And Governance Journal* 114.

¹⁶ Rifqi Asy'ari et al, 'Kajian Konsep Ekowisata Berbasis Masyarakat Dalam Menunjang Pengembangan Pariwisata: Sebuah Studi Literatur' (2021) 6(1) *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama Dan Budaya* 9.

¹⁷ R Mhanna, A Blake and I Jones, 'Spreading Tourists Around Host Countries Of Mega Sport Events' (2019) 11(5) *Worldwide Hospitality And Tourism Themes* 611.

¹⁸ D Ompusunggu and M Williandani, 'Geopark Kaldera Toba: Membangun Pariwisata Dan Melindungi Lingkungan' (2024) 11(1) *Jiaa* 88.

¹⁹ C Kuntadi, Kalis Endah Wahyuni and Christine Maisye Mansawan, 'Literature Review: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Penganggaran Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia' (2022) 3(6) *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 561.

komersial tanpa memperhatikan esensi dan makna aslinya, sehingga diperlukan konsep pariwisata berkelanjutan yang menyeimbangkan manfaat ekonomi dengan pelestarian budaya dan lingkungan.²⁰ Penelitian menunjukkan bahwa wisata massal di berbagai destinasi sering kali menyebabkan degradasi budaya lokal yang telah lama dijaga oleh masyarakat, mempertegas perlunya regulasi yang memastikan perkembangan pariwisata tetap menghormati nilai adat dan kebiasaan setempat.²¹ Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menjalankan peran strategisnya dalam menegakkan kebijakan yang tidak hanya mengoptimalkan potensi ekonomi pariwisata, tetapi juga melindungi dan melestarikan warisan budaya agar tetap lestari di tengah arus globalisasi wisatawan.²²

5. Perubahan Pola Pikir Masyarakat Lokal

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat lokal melalui edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, agar mereka memahami baik manfaat maupun dampak negatif dari *overtourism*.²³ Kesadaran masyarakat terhadap keseimbangan antara pertumbuhan sektor pariwisata dengan kelestarian sosial, budaya, dan lingkungan sangat penting dalam mencapai keberlanjutan pariwisata, sehingga kebijakan pemerintah harus mendukung program pelatihan dan kampanye yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata yang ramah lingkungan.²⁴ Penelitian menunjukkan bahwa perubahan pola pikir masyarakat terhadap dampak pariwisata yang tidak terkendali sangat memengaruhi keberhasilan pengelolaan destinasi, karena tanpa kesadaran akan dampak negatif seperti kemacetan, kerusakan lingkungan, dan pergeseran budaya,

²⁰ K Karman, R Deswanto and SA Ningsih, 'Implementasi E-Government Pada Pemerintah Daerah' (2021) 2(2) *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan* 43.

²¹ R Adiwilaga and A Kurniawan, 'Strategi Pemerintah Daerah Terkait Pencegahan Paham Radikalisme Agama Di Kabupaten Bandung' (2021) 5(1) *Jisipol: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.

²² KJ Mahadewi et al, 'Sosialisasi Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Objek Wisata Lembu Putih Desa Taro Kabupaten Gianyar' (2024) 7(7) *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2535.

²³ A Fartini, 'Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen Uud 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity Dan Diversity' (2022) 1(1) *Pledoi (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 1.

²⁴ G Wijayanto, T Lesmana and DP Nurhasanah, 'The Effect Of Tourism Restriction Policies And Ecology-Oriented Marketing Strategies On Reducing Over-Tourism And Tourist Experience In Indonesia' (2024) 2(6) *West Science Social And Humanities Studies* 985.

masyarakat akan sulit beradaptasi dengan kebutuhan pengelolaan yang berkelanjutan.²⁵ Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berperan aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan budaya guna menjamin keberlanjutan sektor pariwisata.²⁶

B. Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Overtourism di Desa Pecatu

Permasalahan *overtourism* di Desa Pecatu telah berkembang menjadi isu strategis yang tidak hanya menjadi perhatian pemerintah desa, tetapi juga pemerintah kabupaten/kota Badung, yang kini meminta bantuan pemerintah provinsi untuk mengalokasikan sumber daya tambahan guna mengatasi lonjakan wisatawan yang tidak terkendali, yang menyebabkan kemacetan, degradasi lingkungan, tekanan terhadap infrastruktur, dan terganggunya kehidupan masyarakat lokal.²⁷ Pemerintah provinsi diharapkan berperan sebagai fasilitator dalam menyusun kebijakan terintegrasi dengan koordinasi lintas sektor guna menciptakan keseimbangan antara manfaat ekonomi dan pelestarian lingkungan serta budaya lokal, termasuk langkah-langkah konkret seperti pembatasan jumlah wisatawan, pengembangan pariwisata berkelanjutan, serta edukasi kepada wisatawan dan pelaku usaha.²⁸ Berdasarkan teori kewenangan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pemerintah Kabupaten Badung telah merancang berbagai kebijakan, termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalan lingkar untuk mengatasi kemacetan yang semakin parah, demi meningkatkan kualitas pelayanan wisata dan mencegah kerusakan infrastruktur lebih lanjut.²⁹ Selain pembangunan fisik, pemerintah

²⁵ RY Alimuddin and R Rosnani, 'Analisis Model Gerakan Anti-Tourism Dalam Merespon Praktik Overtourism Di Barcelona, Venice, Hawaii' (2023) 7(1) *Jils (Journal Of International And Local Studies)* 41.

²⁶ Anisa Fadila, 'Tourism Development And Cultural Preservation In Tenganan Village, Karangasem, Bali' (2023) 1(3) *Journal Of Humanities And Social Studies* 1140.

²⁷ I Hastuti, M Anggraini and I Budiman, 'Konsep Pariwisata Hijau Bagi Pemulihan Model Pariwisata Indonesia Pasca Pandemi Covid-19' (2023) 9(6) *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 175.

²⁸ Ananta Fadli Sutarli and S Kurniawan, 'Peranan Pemerintah Melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menanggulangi Phising Di Indonesia' (2023) 3(2) *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4208.

²⁹ MM Samudra, VA Aris Dayanti and S Humulhaer, 'Analisis Yuridis Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kendaraan Roda Empat Akibat Wanprestasi Berdasarkan Teori Kepastian Hukum' (2023) 1(3) *Lex Veritatis* 1.

daerah juga berperan dalam pengelolaan aspek sosial dan budaya dengan kebijakan seperti pengaturan jumlah wisatawan di destinasi wisata padat dan penerapan pungutan bagi wisatawan asing, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023, yang bertujuan mengendalikan pertumbuhan pariwisata yang berlebihan dan menjaga keberlanjutan sektor pariwisata di Bali.³⁰

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, tantangan dalam implementasinya tetap muncul, terutama dalam pengelolaan jumlah wisatawan yang sering menciptakan overcapacity dan menyebabkan kemacetan, kerusakan lingkungan, serta gangguan sosial.³¹ Kesadaran masyarakat terhadap dampak *overtourism* sangat penting dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan, sehingga kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal menjadi faktor krusial dalam perumusan kebijakan yang seimbang antara keuntungan ekonomi dan pelestarian budaya serta lingkungan.³² Namun, banyak pelaku usaha di Desa Pecatu merasa kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan, padahal mereka memiliki wawasan mendalam mengenai tantangan di lapangan, yang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan.³³ Selain itu, pengelolaan sampah menjadi tantangan utama akibat tingginya jumlah wisatawan, di mana kebijakan yang ada belum cukup efektif dalam mengatasi masalah ini, sehingga diperlukan strategi yang lebih komprehensif serta kampanye kesadaran bagi wisatawan. Dengan demikian, pengelolaan sampah harus menjadi bagian integral dari perencanaan pariwisata berkelanjutan sebagaimana diatur dalam kebijakan pemerintah daerah.³⁴

Pelestarian budaya menjadi aspek penting dalam menangani *overtourism* di Desa Pecatu, di mana kebijakan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menjaga keseimbangan antara pariwisata dan nilai-nilai budaya lokal.³⁵ Selain itu, pengawasan terhadap jumlah

³⁰ Wahyuni (n 2).

³¹ H Amalika, SR Izza and D Ardiani, 'Dampak Presidensi G20 Indonesia Terhadap Peningkatan Wisatawan Mancanegara Di Bali' (2024) 1(4) *Journal Of Macroeconomics And Social Development* 1.

³² Mudiparwanto and Gunawan (n 4).

³³ Rama et al (n 9).

³⁴ S Wifaqah, 'Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Alat Kesehatan' (2020) 3(1) *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 29.

³⁵ A Aulia, 'Prinsip Kehati-Hatian Ppat Dalam Proses Pengikatan Jual Beli Tanah Sebagai Perwujudan Kepastian Hukum' (2022) 4(1) *Recital Review* 244.

wisatawan harus lebih intensif untuk mencegah overcapacity yang berdampak pada kualitas lingkungan dan pengalaman wisata. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2024 menjadi dasar hukum dalam mengatur kunjungan wisatawan asing guna memastikan kelestarian destinasi wisata. Kesadaran masyarakat dan wisatawan dalam menjaga kelestarian lingkungan juga perlu ditingkatkan melalui kampanye edukasi yang lebih aktif. Pemerintah telah menunjukkan komitmen dalam mengatasi kemacetan melalui pembangunan infrastruktur dan pengelolaan parkir yang lebih baik, namun eksekusi kebijakan masih sering lambat dan kurang melibatkan semua pihak terkait. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi kebijakan yang lebih inklusif agar pariwisata di Desa Pecatu dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan dan budaya lokal.

VI. KESIMPULAN

Overtourism di Desa Pecatu membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat serta lingkungan sekitar. Dari sisi positif, meningkatnya jumlah wisatawan berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata serta membuka peluang usaha bagi masyarakat lokal, baik dalam bentuk akomodasi, kuliner, maupun jasa wisata. Namun, di sisi lain, *overtourism* juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan. Salah satunya adalah kemacetan lalu lintas yang semakin parah akibat lonjakan jumlah kendaraan wisatawan, yang tidak diimbangi dengan infrastruktur jalan yang memadai. Selain itu, peningkatan jumlah pengunjung menyebabkan penurunan kenyamanan, baik bagi wisatawan yang mencari pengalaman berlibur yang tenang maupun bagi warga lokal yang harus beradaptasi dengan kondisi yang semakin padat. Kebersihan lingkungan juga menjadi permasalahan serius karena volume sampah meningkat drastis dan sering kali tidak terkelola dengan baik. Lebih jauh, komersialisasi yang berlebihan dalam sektor pariwisata mengakibatkan penyusutan nilai budaya lokal, di mana tradisi dan adat istiadat mulai kehilangan makna aslinya demi memenuhi tuntutan industri pariwisata.

Dalam menghadapi tantangan *overtourism* di Desa Pecatu, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam mengelola dampaknya secara efektif. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah membangun infrastruktur pendukung, seperti jalan lingkar, untuk mengurangi kemacetan di pusat wisata. Selain itu, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan jumlah wisatawan dengan mengenakan pungutan bagi wisatawan asing guna mengontrol kapasitas kunjungan. Pengelolaan sampah juga menjadi prioritas, dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan kebersihan lingkungan serta menjaga kelestarian budaya lokal agar tidak tergerus oleh arus komersialisasi. Regulasi yang lebih ketat dalam pengelolaan destinasi wisata juga diterapkan untuk mengatasi masalah overcapacity dan mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan sosial. Lebih lanjut, pemerintah daerah berusaha mendorong partisipasi aktif masyarakat serta pelaku usaha dalam pengelolaan pariwisata yang lebih berkelanjutan, sehingga manfaat ekonomi dari sektor ini dapat dinikmati tanpa mengorbankan kualitas hidup warga serta kelestarian lingkungan dan budaya Desa Pecatu.

REFERENSI

Jurnal

Abdul Kadir, I, LW Wulandari and T Hendratono, 'Pengembangan Batu Angus Sebagai Kawasan Geowisata Melalui Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Ternate Maluku Utara' (2022) 1(2) *Scientia: Journal Of Multi Disciplinary Science* 86

Adiwilaga, R and A Kurniawan, 'Strategi Pemerintah Daerah Terkait Pencegahan Paham Radikalisme Agama Di Kabupaten Bandung' (2021) 5(1) *Jisipol: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*

Alimuddin, RY and R Rosnani, 'Analisis Model Gerakan Anti-Tourism Dalam Merespon Praktik Overtourism Di Barcelona, Venice, Hawaii' (2023) 7(1) *Jils (Journal Of International And Local Studies)* 41

Amalika, H, SR Izza and D Ardiani, 'Dampak Presidensi G20 Indonesia Terhadap Peningkatan Wisatawan Mancanegara Di Bali' (2024) 1(4) *Journal Of Macroeconomics And Social Development* 1

Andrianto, F, 'Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia'

(2020) 3(1) *Administrative Law And Governance Journal* 114

Angkasa, N, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar* (CV. Laduny Alifatma, 2019)

Antari, PED and VAY Situmorang, 'Efektivitas Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tle) Dalam Penegakan Aturan Lalu Lintas Di Kota Denpasar' (2024) 10(2) *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 310

Armia, Muhammad Sidiq, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022)

Asy'ari, Rifqi et al, 'Kajian Konsep Ekowisata Berbasis Masyarakat Dalam Menunjang Pengembangan Pariwisata: Sebuah Studi Literatur' (2021) 6(1) *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama Dan Budaya* 9

Aulia, A, 'Prinsip Kehati-Hatian Ppat Dalam Proses Pengikatan Jual Beli Tanah Sebagai Perwujudan Kepastian Hukum' (2022) 4(1) *Recital Review* 244

Fadila, Anisa, 'Tourism Development And Cultural Preservation In Tenganan Village, Karangasem, Bali' (2023) 1(3) *Journal Of Humanities And Social Studies* 1140

Fartini, A, 'Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen Uud 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity Dan Diversity' (2022) 1(1) *Pledoi (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 1

Hadi, F and F Gandryani, 'Konstitutionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah: The Constitutionality Of Nusantara Capital City Authority As A Local Government' (2022) 52(1) *Majalah Hukum Nasional* 69

Hariyanto, H, 'Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia' (2020) 3(2) *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 99

Hartami, A, L Karjoko and F Ulfatun Najicha, 'Optimalisasi Peran Pemerintah Dalam Kebijakan Penanganan Limbah Medis' (2023) 2(1) *Pledoi (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 12

Hastuti, I, M Anggraini and I Budiman, 'Konsep Pariwisata Hijau Bagi Pemulihian Model Pariwisata Indonesia Pasca Pandemi Covid-19' (2023) 9(6) *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 175

Karman, K, R Deswanto and SA Ningsih, 'Implementasi E-Government Pada Pemerintah Daerah' (2021) 2(2) *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan* 43

Kuntadi, C, Kalis Endah Wahyuni and Christine Maisye Mansawan, 'Literature Review: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Penganggaran Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia' (2022) 3(6) *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 561

Mahadewi, KJ et al, 'Sosialisasi Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Objek Wisata Lembu Putih Desa Taro Kabupaten Gianyar' (2024) 7(7) *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2535

Mhanna, R, A Blake and I Jones, 'Spreading Tourists Around Host Countries Of Mega Sport Events' (2019) 11(5) *Worldwide Hospitality And Tourism Themes* 611

Mudiparwanto, W and A Gunawan, 'Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (Oss)' (2021) 7(1) *Diversi: Jurnal Hukum* 106

Mulia, Victor Bangun, 'MEMAHAMI DAN MENGELOLA DAMPAK PARIWISATA' (2021) 20(1) 75

Munawar, R, 'Pengelolaan Geopark Untuk Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan (Studi Kasus Di Geopark Ciletuh-Palabuhanratu)' (2023) 21(1) *Jurnal Bisnis, Manajemen & Ekonomi* 865

Nisa, ANK, 'The Role Of Bumdes In Overcoming Over Tourism In Bejiharjo Tourism Village Karangmojo District Gunung Kidul Regency' (2023) 1(2) *Journal Of Tourism Sciences (Toursci)*

Ompusunggu, D and M Williandani, 'Geopark Kaldera Toba: Membangun Pariwisata Dan Melindungi Lingkungan' (2024) 11(1) *Jiaa* 88

Rama, BGA et al, 'Pemberdayaan Subak Uma Lambing: Implementasi Green Tourism Dan Kesadaran Hukum' (2024) 5(6) *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 12966

Samudra, MM, VA Aris Dayanti and S Humulhaer, 'Analisis Yuridis Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kendaraan Roda Empat Akibat Wanprestasi Berdasarkan Teori Kepastian Hukum' (2023) 1(3) *Lex Veritatis* 1

Sutarli, Ananta Fadli and S Kurniawan, 'Peranan Pemerintah Melalui

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menanggulangi Phising Di Indonesia' (2023) 3(2) *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4208

Wahyuni, RB, 'Kajian Faktor Overtourism Di Destinati Wisata Bahari Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat' (2022) 9(1) *Barista: Jurnal Kajian Bahasa Dan Pariwisata*

Wifaqah, S, 'Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Alat Kesehatan' (2020) 3(1) *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 29

Wijayanto, G, T Lesmana and DP Nurhasanah, 'The Effect Of Tourism Restriction Policies And Ecology-Oriented Marketing Strategies On Reducing Over-Tourism And Tourist Experience In Indonesia' (2024) 2(6) *West Science Social And Humanities Studies* 985

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Indonesia).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Wisatawan Asing (Indonesia).

Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengaturan Kunjungan Wisatawan Asing (Indonesia).